

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi publik merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dibentuknya instansi adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, instansi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu dengan menerapkan transparansi dalam pelayanan, akuntabilitas dalam kinerja, efektivitas dan efisiensi kerja, serta mendorong partisipasi masyarakat. Instansi yang profesional dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (KPU, 2023).

Salah satu bentuk Instansi publik adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD didirikan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah serta menyelenggarakan pelayanan publik. Salah satu bentuk BUMD yang berperan langsung dalam pelayanan dasar masyarakat adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam). Perumdam bertugas menyediakan air bersih bagi masyarakat sehingga dituntut untuk dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan tata kelola pada perusahaan daerah. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian publik terjadi pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pemberitaan Pikiran Rakyat Jateng (2026), Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor)

Jawa Tengah mengungkap adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan perusahaan. Dugaan tersebut meliputi rekrutmen pegawai yang dilakukan secara tertutup dan diduga tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat umum, sehingga berpotensi menimbulkan praktik nepotisme. Selain itu, ditemukan pula dugaan ketidakwajaran dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan koperasi karyawan serta pengelolaan dana representasi (REP) yang dinilai belum optimal. GNP Tipikor juga meminta DPRD Banyumas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi berbagai dugaan penyimpangan tersebut (Pikiran Rakyat Jateng, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola organisasi yang dapat berdampak pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan.

Fenomena serupa juga ditemukan pada PDAM Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan laporan Antara News (2024), terdapat dugaan penyimpangan dana penyertaan modal yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara dana yang dicairkan dan laporan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dapat meningkatkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik (Antara News, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, setiap instansi publik termasuk Perumdam memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan media informasi yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang tidak berkualitas dapat menurunkan kepercayaan publik dan menghambat terciptanya tata kelola yang baik.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam

penyusunan anggaran memungkinkan pegawai terlibat secara aktif dalam perencanaan keuangan, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Bandiyono (2020) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Imelia *et al.*, (2021) menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang kedua yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal salah satu elemen penting dalam struktur organisasi yang digunakan untuk mengawasi aktivitas entitas oleh manajemen guna memastikan terlaksananya tata kelola yang baik (Heinrich & Probohudono, 2023). Sistem Pengendalian Internal yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan akurat dan dapat diandalkan. Penelitian yang dilakukan oleh Heinrich & Probohudono (2023), menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian oleh Kansah *et al.*, (2023) menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang ketiga adalah komitmen organisasi. Menurut Putri (2024), komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi yaitu dorongan dalam individu sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu. Komitmen organisasi yang tinggi di kalangan karyawan juga berkontribusi pada peningkatan laporan keuangan. Karyawan memiliki komitmen yang tinggi cenderung lebih bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan tugas mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2022) menunjukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian oleh

Sopian *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang keempat yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Kansah *et al.*, (2023) sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam terbentuknya laporan keuangan daerah yang berkualitas. Untuk dapat mencapai laporan keuangan dengan kualitas baik, pemerintah membutuhkan peran dari Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang akuntansi (Fakhri *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Sopian *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kelima yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi dapat mempercepat proses pengolahan data dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Penelitian oleh Masprayoga *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Lantu *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adi Sopian *et al.*, (2024) yang sebelumnya meneliti pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel partisipasi penyusunan anggaran sebagai faktor tambahan yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan serta menggunakan objek penelitian Perumdam Tirta Satria Kabupaten

Banyumas yang saat ini menjadi sorotan publik akibat dugaan permasalahan tata kelola.. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah partisipasi penyusunan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh positif partisipasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Untuk menganalisis pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris serta memperkuat pemahaman konseptual mengenai keterkaitan antara partisipasi penyusunan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan dan penyajian laporan keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Bagi Peneliti diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran dan pengetahuan mengenai partisipasi penyusunan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan keterlibatan pegawai dalam penyusunan anggaran, penguatan sistem pengendalian internal, memperkuat komitmen organisasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain, memperluas objek penelitian, atau menggunakan metode dan pendekatan penelitian yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.